

KOORDINASI ANTAR BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DI KABUPATEN SEKADAU

Oleh:
ESTER APRODITE
NIM. E42012085

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : Ester.apro26@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui koordinasi internal antar bidang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Skripsi ini juga ditulis untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor belum efektifnya koordinasi internal pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Teori yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah teori Hasibuan yang menyatakan koordinasi internal dapat terwujud dengan dengan 3 dimensi, yaitu adanya Strategi, Tanggung Jawab dan Tujuan yang Jelas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang mana berupa kata-kata dan gambar. Lokasi penelitian berada pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Subjek dalam penelitian ini antara lain ialah Kepala Badan, Kepala Bidang, Penyuluh Lapangan, Ketua Kelompok Himpunan Tani dan Petani. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum koordinasi antar bidang belum berjalan secara efektif. Indikator penelitian di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ialah strategi, tanggung jawab dan tujuan yang jelas sudah dilaksanakan dengan efektif.

Kata-kata Kunci : Koordinasi Internal, Penyuluhan Pertanian, Kerjasama Tim.

THE COORDINATION AMONG PARTS ON FOOD SECURITY AGENCY AND ENLIGHTMENT AT SEKADAU COUNTY

Abstract

This thesis written is intended to know about internal coordination among parts in implementing agricultural extension on Food Security Agency and enlightenment at Sekadau County. This thesis is also written to know factors that caused ineffectives of internal coordination on Food Security agency and enlightenment at Sekadau County. Theory used as indicators in this research is Hassibuan theory which asserted internal coordination can be achieved by 3 dimensions consist of strategy, responsibility and purpose explicit.

This research used qualitative method with descriptive type by interpretation towards founding data on the spot which consist of words and pictures. This research took place in Food Security agency and enlightenment of Sekadau County. Subjects of this research are head of agency, head of section, field counselor, chief of peasants and agricultural organization. Data collection technique are interview, documentation, and observation. This research produced conclusion that coordination among sections has not been ran effectively in general. Indicators research at Food Security agency and enlightment are strategy, responsibility and purpose explicit have been efektifive.

Keywords : Internal Coordination, Agricultural extension, Teamwork.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Ketahanan pangan terus menjadi isu global, terlebih karena diyakini bahwa pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang tidak akan mengalami pertumbuhan yang bersifat meningkat lebih cepat dalam waktu 50 tahun mendatang. Untuk menghadapi tantangan ini, komunitas global secara bersama-sama telah menetapkan target yang di harapkan dapat di realisasikan melalui apa yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tujuan pembangunan millennium (Menurut Badan ketahana Pangan Nasional). MDGs adalah sebuah paradigma pembangunan global dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000(Sumber: Situs Bappenas Laporan MDGs Indonesia).

Isi dari MDGs yang mencakup didalamnya antara lain, menghilangkan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, mencapai pendidikan dasar yang universal, mempromosikan kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, mengurangi kematian anak, dan memperbaiki kesejahteraan ibu dan banyak lagi peningkatan kesejahteraan penduduk lainnya (Sumber: Badan PBB informasi

dasar tujuan pembangunan millennium). Namun untuk memenuhi agenda MDGs hal itu bukanlah persoalan yang mudah karna masih banyaknya jumlah penduduk dunia yang terjebak dalam kemiskinan dan kekurangan pangan. Konsep ketahanan pangan sendiri sebenarnya muncul pertama kali tahun 1974 ketika dilaksanakannya konfrensi pangan dunia.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan telah menjalankan urusan sub bidang ketahanan pangan. Pelaksanaan koordinasi internal yang terjalin antara bidang ketahanan Pangan, dan bidang penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem yang saling mempunyai ketergantungan, dan peran koordinasi sangat diperlukan agar adanya strategi untuk pelaksanaan setiap kegiatan, pelaksanaan tugas tersebut disertai tanggung jawab dan adanya tujuan yang jelas sebagai titik akhir pencapaian suatu organisasi.

Kondisi sebenarnya pertanian di Kabupaten Sekadau khususnya Kecamatan Sekadau Hilir masih pada tahap rawan pangan dimana dari 79 desa dengan persentase 90,80% Status Ketahanan Pangan masih rawan pangan, keadaan petani dengan 138 jumlah kelompok tani belum mampu memenuhi aman pangan yaitu 5 ton beras, hasil yang mampu petani peroleh ialah 2,76 ton padi. Perbandingan dengan Kecamatan Nanga Taman dan

Belintang Hulu yang sudah mampu pada tingkat aman pangan dengan produksi 3.077 Kg cadangan pangan dan Kecamatan anga Taman 2.875 Kg cadangan beras, di samping tingkat kesuburan tanah dan cuaca yang berbeda-beda, melihat fenomena tersebut peneliti tertarik membahas tingkat kerawanan pangan di kecamatan Sekadau Hilir yang belum sampai pada aman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Melihat fenomena tersebut alur koordinasi sangat berperan penting khususnya koordinasi internal di laksanakan pada satu garis komando sejajar memiliki kedudukan yang sama namun menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda dan mempunyai hubungan saling keterkaitan. Dalam pelaksanaannya strategi penyuluhan seharusnya dilaksanakan sampai pada tingkat desa-desa, data sebanyak 87 desa namun hanya 40 desa di Kabupaten Sekadau yang pernah mendapat penyuluhan pertanian, dari data tersebut strategi pelaksanaan penyuluhan masih sangat rendah, dengan 25 tenaga penyuluh. Jumlah desa yang terdapat pada Kecamatan Sekadau Hilir ialah sebanyak 17 desa, idealnya satu desa di isi oleh dua tenaga penyuluh, dari data tersebut strategi penyuluhan kekurangan tenaga penyuluh lapangan. Penyuluhan hanya dilaksanakan pada kota kabupaten yang mudah diakses sedangkan petani pada plosok desa juga

memerlukan perhatian dan sosialisasi yang sama dari Bidang ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sosialisasi pengetahuan tentang mengelola lahan pertanian ternyata tidak sampai pada desa-desa terpencil. Pendistribusian bibit padi unggul kepada petani tidak merata hanya 50% mengandalkan bibit berasal dari penyuluhan, terlihat dari padi yang di tanam petani adalah benih lokal yang berasal dari petani sendiri yang hasilnya hanya dapat di panen dalam sekali setahun, tentu saja hasil tersebut tidak mencukupi sebagai persediaan pangan petani maupun untuk konsumsi dalam jangka setahun kedepan.

Ketersediaan pangan di setiap kabupaten idealnya masing-masing 100 ton beras, karna strategi penanganan pangan sangat rendah, perolehan petani hanya mencapai 5 ton beras per kecamatan. Subsektor pertanian tanaman pangan terdiri dari komoditi padi, palawija dan hortikultura. Pada tahun 2015 di Kabupaten Sekadau, luas panen padi mencapai 15.340 Ha, dan menghasilkan produksi 35.941 ton gabah kering giling (GKG) dan di giling menghasilkan beras 30.572 ton beras (Sumber Data : Laporan Akhir BKP2 Tahun 2015) sedangkan untuk sampai pada aman pangan ialah 100 ton beras dengan perhitungan 62.224 penduduk Kabupaten Sekadau. Berdasarkan data tersebut tingkat rawan pangan masih menghantui masyarakat Sekadau dengan kemampuan

Penyuluhan yang dilaksanakan seharusnya tiga kali turun lapangan dalam dua bulan namun nyatanya penyuluh lapangan keluar kantor namun penyuluhan tidak terlaksana.

2. Fokus Penelitian

Berpedoman pada latar belakang di atas penulis perlu memfokuskan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah Koordinasi internal antar bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau.

3. Rumusan Permasalahan

a. Rumusan Masalah Secara Umum

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya pada latar belakang masalah, perumusan masalahnya ialah sebagai berikut: Bagaimana Koordinasi internal antar bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau.

b. Perumusan masalah secara khusus ialah sebagai berikut :

- (1). Bagaimana mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian ?
- (2). Bagaimana Strategi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian ?
- (3). Bagaimana Bentuk Tanggung jawab antar bidang dalam pelaksanaan penyuluhan lapangan ?

- (4). Bagaimana pelaksanaan Tujuan yang jelas dapat tercapai pada BKP2 ?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah untuk :

1. Mendeskripsikan Strategi penyuluhan dan ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau.
2. Menjelaskan koordinasi internal dan tanggung jawab BKP2 dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sekadau.
3. Mengetahui Tujuan yang Jelas dari BKP2 di Kabupaten Sekadau.

5. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna dan bermanfaat baik dari segi akademis bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan maupun praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau khususnya di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan untuk mewujudkan kemandirian pangan.

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis.

2. Bahan bacaan dan literatur tambahan bagi peneliti lain yang juga mengkaji tentang analisis koordinasi dalam suatu badan.
3. Sumber penelitian relevan bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai:

1. Koreksi yang bermanfaat bagi BKP2 dalam melaksanakan koordinasi internal.
2. Bagi peneliti, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan sertakemampuan berfikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Koordinasi Internal

Menurut Manila (2000:50), Koordinasi Internal merupakan kerjasama antar bagian yang mempunyai tingkatan setara, tugas dan fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda, namun menyatukan suatu tujuan dalam organisasi. Koordinasi Internal dibagi menjadi tiga yaitu koordinasi vertikal adalah dimana antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan secara structural terdapat

hubungan hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando. Koordinasi horizontal adalah koordinasi fungsional dimana yang mengkoordinasi mempunyai tingkat eselon yang sama. Koordinasi diagonal adalah koordinasi fungsional dimana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tapi satu dengan yang lainnya tidak berada dalam satu garis komando.

Menurut Tripathi dan Reddy (2000:34) Berdasarkan jenisnya, koordinasi di bedakan atas: 1) Koordinasi vertical, 2) Koordinasi horizontal, 3) Koordinasi internal, 4) Koordinasi eksternal. Dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi perlunya kesatuan tindakan yang diwujudkan dalam koordinasi antar unit-unit kerja. Fungsi koordinasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam meningkatkan kemandirian pangan khususnya beras, sangat memerlukan unsur koordinasi internal dimana penyatupaduan gerak pada satu garis komando yang mempunyai kedudukan yang sama namun fungsi yang berbeda untuk dapat berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi suatu organisasi.

Koordinasi horizontal juga mempengaruhi tercapainya tujuan dalam suatu organisasi yaitu penyatuan kegiatan

pada bagian yang setingkat seperti penyuluh lapangan dan dan bidang ketahanan pangan yang mengurus administrasi di Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sebaliknya koordinasi internal merupakan kesatuan tindakan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan termasuk didalamnya staf-staf, pekerja pada tingkat yang berlainan antara bagian dan seksi dan khusus internal Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Koordinasi eksternal yaitu koordinasi dengan pihak luar yang mempunyai hubungan seperti Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura serta Kepala Badan lingkungan Hidup.)

Tripathi dan Reddy (2000:36) mengungkapkan ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, 4 diantaranya yakni : Hubungan langsung, Kontinuitas, Komunikasi yang efektif dan Organisasi yang sederhana. Untuk mewujudkan kemandirian pangan khususnya beras di Kabupaten Sekadau, peran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan belum menunjukkan adanya komunikasi yang efektif untuk bekerjasama dengan sector lain maupun internal pada Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Melalui komunikasi yang efektif pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan organisasi dapat di hindarkan dan kegiatan pegawai dapat di arahkan secara harmonis menuju

tujuan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan untuk meningkatkan kemandirian pangan khususnya beras di Kabupaten Sekadau.

Menurut Terry dalam Moekijat (1994:37) Koordinasi Internal merupakan: Proses kerjasama antar bagian yang untuk menyatukan tujuan dalam satu garis komando yang sama dengan memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus di ambil untuk menghasilkan koordinasi yang di harapkan. Pada pemerintahan atau instansi pemerintahan lainnya sebagai suatu organisasi juga mempunyai tujuan . Untuk mencapai tujuan seluruh aparat dan bagian yang ada di dalamnya atau pihak-pihak lain yang terkait perlu mengadakan koordinasi dan hubungan kerja. Bahkan lebih dari itu, semua bagian harus bergerak sebagai suatu kesatuan yang terkoordinasi. Koordinasi internal menurut Hasibuan (2007) Adanya strategi, adanya tanggung jawab dan adanya tujuan yang jelas

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan saturasi data.

Hal ini bertujuan agar tercapai titik jenuh dalam melakukan pengumpulan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan kerjasama Internal Antar Bidang

Peneliti melakukan penelitian terhadap koordinasi antar bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep koordinasi internal menurut (Hasibuan 2007) Adanya Strategi, Tanggung jawab dan Tujuan yang jelas. Kesuksesan koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga beban tiap bagian menjadi serasi, selaras dan seimbang.

Koordinasi Internal pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan suatu kesatuan yang menyangkut kesadaran semua pihak yang ada di dalamnya. Setiap bidang berpartisipasi secara aktif melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan koordinasi antar bidang perlu di ketahui tujuan dari organisasi tersebut untuk dapat menyatu padukan kegiatan dengan melihat aspek penting dalam perwujudan ketahanan

pangan adalah pengembangan agribisnis pangan dan pengembangan kelembagaan pangan yang dapat menjamin keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis mengamati bahwa koordinasi antar bidang terjalin dengan baik hal ini terbukti dari rapat koordinasi yang selalu dilaksanakan di awal kegiatan, hasilnya masing-masing bidang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disamping beberapa faktor yang penulis kemukakan sebagai penghambat koordinasi tersebut. Setiap keputusan dan tindakan seseorang didalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan harus mempertimbangkan efek yang muncul pada bidang lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antar bidang sudah terjalin dengan baik, namun ada beberapa factor yang penulis temukan di lapangan penyebab koordinasi internal tersebut kurang terlaksana salah satunya adalah komunikasi yang kurang terjalin antara bidang disebabkan sibuk mengurus masing-masing pekerjaan baik penyuluh lapangan maupun bidang ketahanan pangan, demikian juga bidang-bidang

lainnya, koordinasi yang seharusnya dilakukan diawal kegiatan mempunyai timbal baik bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan.

2. Strategi Koordinasi Antar Bidang

Strategi sangat diperlukan dalam proses pembagian kerja, agar pekerjaan yang di berikan tidak tumpang tindih dan di perlukan koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan agar kerjasama yang di lakukan dapat berjalan secara terus-menerus. Pada dasarnya Koordinasi merupakan proses penyatupaduan semua kegiatan yang berlainan satu dengan yang lain. Menurut Hasibuan (2007) arahan adalah memberikan bimbingan atau petunjuk agar adanya kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing bidang setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus terkoordinasi dengan pimpinan terutama yaitu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis menyimpulkan bahwa strategi yang dilaksanakan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sudah berjalan secara efektif, hal ini terlihat dari berbagai poin penting rancangan kegiatan yang ditargetkan dan tercapai dengan segala keterbatasan yang di miliki, hasilnya

kebutuhan pangan di kabupaten sekadau secara keseluruhan tidak pernah sampai pada waspada pangan atau kelaparan yang melanda. Hal tersebut merupakan hasil jerih payah kerjasama antar bidang dan partisipasi dari para petani. strategi kegiatan yang efektif memerlukan koordinasi yang menyeluruh untuk mendukung semua kegiatan pada Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kewajiban memiliki, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab sifatnya kodrati artinya tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia untuk itu setiap orang yang melakukan pekerjaan harus bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan koordinasi ini di artikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan tumpang tindih pekerjaan. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan kinerja penyuluh lapangan belum efektif terlihat dari data sebanyak 87 desa namun hanya 40 desa di Kabupaten Sekadau yang pernah mendapat penyuluhan pertanian, dari data

tersebut strategi pelaksanaan penyuluhan masih sangat rendah, dengan 25 tenaga penyuluh. Jumlah desa yang terdapat pada Kecamatan Sekadau Hilir ialah sebanyak 17 desa, idealnya satu desa di isi oleh dua tenaga penyuluh, dari data tersebut tanggung jawab penyuluhan belum terselenggara karna kekurangan tenaga penyuluh lapangan.

Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab setiap bidang pada badan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Sekadau sudah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dari tidak pernah terjadi tumpang tindih pekerjaan, laporan pertanggungjawaban kegiatan selalu tepat waktu di serahkan, monitor setiap bidang kepada penyuluh lapangan dilaksanakan dengan baik walaupun kendala jarak tempuh menuju desa-desa tempat penyuluhan. Hasilnya ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau selalu pada tingkat aman, dan belum pernah terjadi bencana kelaparan atau pun kelangkaan pangan yang berlangsung lama.

4. Tujuan yang jelas dalam Pelaksanaan Penyuluhan Professional.

Tujuan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dititikberatkan pada pesan yang disampaikan. Jika pesan yang disampaikan penyuluh dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat desa dengan baik dan sukarela, berarti tugas penyuluhan telah terlaksana. Faktanya, kesuksesan tugas penyuluh tergantung pada kredibilitas penyuluh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, setiap desa wajib memiliki satu penyuluh. Di berbagai negara seperti Thailand, sebanyak 70% dari keberhasilan pertanian ditentukan oleh penyuluh pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengungkapkan bahwa tujuan penyediaan bibit unggul, pupuk maupun pestisida yang di peruntukan kepada petani ialah semata untuk meningkatkan produksi pangan. Untuk mewujudkan terpenuhinya ketersediaan pangan, pentingnya kerjasama antar bidang dalam mewujudkan tujuan organisasi karna petani sebagai target utama sulit memahami materi yang diberikan oleh penyuluh lapangan, demikian juga dengan bidang ketersediaan pangan yang merasakan kurangnya kemauan petani untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang di berikan oleh Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan khususnya Sub Bidang Ketersediaan Pangan disamping

factor iklim dan cuaca yang ikut mendukung hasil pangan maksimal.

Kemudian berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa Sub Bidang Ketersediaan Pangan secara aktif melaksanakan tugas dan fungsinya melalui penyediaan bibit unggul, pupuk maupun pestisida yang hasilnya bibit unggul dapat di tanami setahun dua kali dan memberikan dampak pada petani untuk hasil panen yang lebih banyak.

D. SARAN

Dalam penelitian ini peneliti juga memberikan saran yang semoga dapat diperhatikan, berikut saran yang akan peneliti sampaikan :

1. Koordinasi internal antar bidang harus lebih dipererat, masih perlu ditingkatkan kesadaran antar bidang bahwa pekerjaan yang di bebankan semuanya memerlukan timbal-balik dan melalui komunikasi yang efektif dapat menciptakan koordinasi yang baik.
2. Masih perlu penambahan tenaga penyuluhan mengingat banyaknya jumlah desa tidak sesuai dengan jumlah penyuluh, serta penambahan staf pada berbagai bidang internal Badan

ketahanan Pangan, untuk mendukung terselenggaranya tujuan organisasi.

3. Perlu pelatihan tambahan agar penyuluh lapangan lebih memahami tugasnya dan mempunyai kemampuan untuk menghadapi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh petani. Motivasi, pengetahuan, wawasan petani dan penyuluh juga lebih dikembangkan dengan berbagai bimbingan. Penyuluh memahami keinginan petani dan mampu mewujudkan wadah yang lebih baik untuk petani menyampaikan aspirasi mereka. Penyuluh dalam penyuluhan di pedesaan mengubah pola pikir petani, bukan mengubah cara bertani.
4. Penyediaan sarana dan prasarana menuju desa-desa agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik tanpa terhalang akses dan fasilitas menuju desa-desa terpencil. Penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi penyuluh lapangan yang bertugas di desa-desa.

E. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian ini, diantaranya :

1. Sulitnya memperoleh data yang berkaitan ketahanan pangan serta dalam pelaksanaan wawancara, subjek penelitian atau informan yang ingin diwawancarai sulit untuk ditemui karena banyaknya kesibukan.
2. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan peneliti mengakibatkan peneliti kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Di Kabupaten Sekadau

F. APRESIASI

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, khususnya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Di Kabupaten Sekadau yang telah membantu serta memberikan izin selama melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

G. REFERENSI

Sumber Literatur :

- Terry G. R. 2008. *Principle of Management*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- , 2008. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Khaeron Herman. 2012. *Politik Ekonomi Pangan Mengapai Kemandirian, Mewujudkan Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Jhamtami Hira.2008. *Lambung Pangan, Menata Ulang Kebijakan Pangan*. Bandung:INSIST Press, 2008
- Hasibuan. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Pustaka Utama.
- , 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Kencana. 2011. *Koordinasi Pemerintahan*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- , 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Mandar Maju
- , 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Moekijat, 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung : Mandar Maju
- Manila, 2000. *Koordinasi Pemerintahan(Jilid II*. Bandung: Fokus Media
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. 2015. *Sekadau Dalam Angka*. Sekadau. Badan Pusat Statistik.
- Sugandha. 2000. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi* Jakarta: Intermedia

Nasution. 1988. *Teknik Analisis Data*. Bandung : Fokus media

P.C Tripati dan PN Reddy.(2000). *Principles of management. Edisi 4*. Bandung : Alfabeta

Setiana .2005. *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: UI Press

Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : PRODI IP FISIP UNTAN.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian administrasi di lengkapi dengan metode R & D*. Bandung : Alfabeta

-----, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung CV Alfabeta.

-----, 2010. *Metode Penelitian Kombinasi (MixedMethods)*. Bandung :Alfabeta

-----, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

-----,2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan.

Undang-undang No 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Sekadau.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan.

Keputusan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Sekadau.

Skripsi :

Padagi Listiana.2012. *Pelaksanaan koordinasi Pemerintah Dalam Melaksanakan Kewenangan Otonomi Desa di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Tiiti Kabupaten Ketapang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Sulistyoningrum Selvia Syita 2013. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pada Masyarakat Hata Harpan Di Desa Bangku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi* . Fakultas Ekologi Manusia Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ester Aprodite
NIM / Periode Lulus : E42012085 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Ester.apro26@gmail.com / 085753226841

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI ANTAR BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DI
KABUPATEN SEKADAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Januari 2017

(Ester Aprodite)